

The Urgency of Establishing a Global Military Organization to Overcome Rebel Groups that Weaken Countries Around the World

Susilawati

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Susilawati sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Military Organization, Rebel Group, State, Global Security

Received : 03 July

Revised : 19 July

Accepted: 21 August

©2024 Susilawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the responsibility of global governments in maintaining security and stability by highlighting the dynamics of global challenges and emphasizing the importance of international cooperation. This study aims to analyze the need and benefits of establishing a global military organization to protect countries from rebel groups and ensure security and stability. This study uses a qualitative method, with data collection techniques through literature reviews from sources such as books, journals, and documents relevant to the research theme. Data processing is carried out through an interactive analysis approach, which includes data collection, reduction, analysis, and verification. The findings indicate that global leaders must prioritize cooperation and sustainable resource management to ensure a harmonious future. This study emphasizes the need for a global military organization to address the threat of rebel groups and protect sovereign states. The establishment of such an organization is considered crucial to prevent conflict and ensure the security and prosperity of all nations in this modern era.

Urgensi Pembentukan Organisasi Militer Global untuk Mengatasi Kelompok Pemberontak yang Melemahkan Negara-Negara di Seluruh Dunia

Susilawati

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding Author: Susilawati sisiwitt27@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Organisasi Militer, Kelompok Pemberontak, Negara, Keamanan Global

Received : 03 Juli

Revised : 19 Juli

Accepted: 21 Agustus

©2024 Susilawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Studi ini mengkaji tanggung jawab pemerintah global dalam menjaga keamanan dan stabilitas dengan menyoroti dinamika tantangan global serta menekankan pentingnya kerja sama internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan manfaat pembentukan organisasi militer global guna melindungi negara dari kelompok pemberontak dan memastikan keamanan serta stabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif, yang mencakup pengumpulan data, reduksi, analisis, dan verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa para pemimpin global harus memprioritaskan kerja sama dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang harmonis. Studi ini menegaskan perlunya organisasi militer global untuk menangani ancaman kelompok pemberontak dan melindungi negara-negara berdaulat. Pembentukan organisasi semacam itu dianggap sangat krusial untuk mencegah konflik dan memastikan keamanan serta kemakmuran semua bangsa di era modern ini.

PENDAHULUAN

Syarat terbentuknya sebuah negara adalah adanya wilayah, bangsa, ideologi dan pengakuan dari negara lain (Samekto, 2018). Setelah semua kriteria ini terpenuhi, negara tersebut memperoleh kedaulatan yang memberinya wewenang untuk melindungi dan mengelola urusannya secara efektif, guna mencapai keamanan, keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Pemerintahan yang efektif memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, sehingga memungkinkan warga negara berinteraksi secara damai dan produktif. Pemerintahan yang efektif ini pada akhirnya membangun fondasi ekonomi yang kuat, yang mendukung kesejahteraan setiap individu. Hal ini mencerminkan konsep ideal yang diupayakan oleh negara-negara di seluruh dunia, suatu peradaban yang stabil dan aman, di mana setiap individu dapat berkembang dalam segala aspek kehidupan.

Selain prinsip dasar kedaulatan negara dan pemerintahan yang efektif, sangat penting untuk mempertimbangkan ancaman umum yang menantang idealisme ini di berbagai negara. Sebagai contoh, ancaman terorisme yang terus-menerus memerlukan kerja sama global, seperti yang terlihat dalam upaya koalisi internasional melawan kelompok seperti ISIS. Selain itu, kelompok seperti Boko Haram di Nigeria menggunakan taktik pemberontakan kekerasan untuk mendestabilisasi wilayah, yang semakin menunjukkan sifat global ancaman teroris. Contoh-contoh ini menegaskan kebutuhan akan respons global yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman teroris dan militer yang menantang kedaulatan negara dan keamanan internasional.

Mengingat tantangan yang terus berlanjut dan kekurangan dari lembaga internasional yang ada, jelas bahwa diperlukan pendekatan baru untuk secara efektif menangani ancaman keamanan kontemporer. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri sering dikritik karena ketidakefektifannya dalam mencegah atau menyelesaikan konflik. Sebagai contoh, PBB mengalami kegagalan besar dalam menangani krisis seperti genosida Rwanda pada tahun 1994, di mana mekanisme intervensinya terbukti tidak memadai untuk mencegah kekejaman massal. Genosida Rwanda mencontohkan keterbatasan pasukan penjaga perdamaian PBB, yang tidak dilengkapi dan tidak diberi wewenang yang cukup untuk mencegah genosida tersebut, yang mengakibatkan hilangnya ratusan ribu nyawa.

Contoh di atas menegaskan perlunya pendekatan yang lebih proaktif terhadap keamanan global. Oleh karena itu, pembentukan organisasi militer global di luar kerangka PBB dapat mengatasi kekurangan yang terlihat dalam kapasitas PBB saat ini. Organisasi yang diusulkan ini akan menjadi koalisi kekuatan militer dari berbagai negara, yang secara khusus dirancang untuk mengantisipasi dan menangkal ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok pemberontak dan entitas bersenjata lainnya yang merongrong kedaulatan dan keamanan nasional. Berbeda dengan aliansi militer yang sudah ada seperti NATO atau pakta pertahanan regional, yang seringkali dibatasi oleh kendala politik, geografis, atau operasional, organisasi baru ini akan fokus secara eksklusif pada ancaman global tanpa dibebani oleh keterbatasan tersebut.

Organisasi ini akan diberdayakan untuk mengambil tindakan tegas dan terkoordinasi terhadap ancaman yang muncul dengan cara yang lebih fleksibel, melewati kompleksitas politik dan penundaan birokrasi yang dapat menghambat aliansi saat ini. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam mengelola serta menetralkan ancaman keamanan global.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dan manfaat pembentukan organisasi militer global yang akan memperkuat keamanan global dengan menyediakan mekanisme pertahanan yang terpadu dan proaktif terhadap kelompok pemberontak serta ancaman lain yang mengancam stabilitas nasional dan internasional. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana organisasi ini dapat mengatasi kekosongan yang ada dalam manajemen keamanan global, dengan fokus pada potensinya untuk memastikan perlindungan negara-negara berdaulat dan keselamatan warganya.

Pembentukan organisasi militer global di luar kerangka PBB diusulkan sebagai langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan global saat ini dan di masa depan. Dengan mengatasi keterbatasan PBB dan menyediakan mekanisme yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman keamanan, maka organisasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan perdamaian dan stabilitas global.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep Keamanan Global

Studi keamanan global merupakan bagian dari disiplin ilmu Hubungan Internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terdapat pergeseran paradigma dalam memaknai keamanan termasuk keamanan global. Pada masa Perang Dingin, kaum realis secara tradisional telah mendominasi studi tentang keamanan dan menekankan pembahasan keamanan pada aspek militer dalam hubungan antar negara. Namun pasca berakhirnya Perang Dingin, terdapat perluasan isu keamanan yang mencakup isu non-militer serta menggeser fokus disiplin keamanan dari negara menjadi keamanan manusia (Buzan, 2008). Hal ini membuat isu-isu non-konvensional (seperti lingkungan hidup, kemiskinan, konflik etnis, kejahatan transnasional, terorisme, masalah penyakit menular, kelaparan, dan sebagainya) kini menjadi fokus utama (Hadiwinata, 2017). Artinya, pendekatan non-tradisional tidak lagi berorientasi pada negara tetapi pada ancaman terhadap keamanan individu.

Keamanan global dipengaruhi oleh faktor sistemik yang memengaruhi perilaku negara yang mana hal ini akan berimbas pada berbagai negara lainnya. Hal ini berarti negara bukan hanya sekedar aktor dalam sistem internasional tetapi pemegang tanggung jawab utama dalam menyediakan keamanan terhadap warga negaranya (Setiawan, 2017). Stoett (1999) menyatakan terdapat empat ancaman terhadap manusia dan keamanan global pasca Perang Dingin, yaitu kekerasan negara, masalah lingkungan hidup, pengusiran penduduk dan globalisasi. Hal ini menurut Stoett akan semakin berkembang di masa depan mencakup terorisme, perselisihan wilayah, senjata pemusnah massal, dan

perang antarnegara. Sementara Kirchner (2007) menyatakan ancaman terhadap keamanan global akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya aktor non-negara. Dalam konteks ini, terdapat tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus yaitu berkaitan dengan para pembuat kebijakan harus menentukan apakah sistem pengaturan keamanan baru akan bersifat kooperatif atau kompetitif dan apakah akan didasarkan pada aliansi atau keseimbangan.

Beragamnya ancaman terhadap negara, baik itu bentuk dan sumber ancamannya, pada akhirnya membuat negara harus bekerja sama mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, perlu dibentuk pengaturan dalam menjaga keamanan global; Jervis (2002) telah memberikan lima kondisi untuk pengaturan keamanan global. Di bawah kondisi-kondisi ini, elit nasional harus: menghindari perang penaklukan dan perang sebagai alat negara, menerima bahwa biaya untuk memulai perang semacam itu dianggap lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh, merangkul prinsip liberalisme ekonomi daripada penaklukan atau imperium, membentuk tata kelola demokratis dalam negeri dan menghormati status quo teritorial.

- **Konsep Organisasi Internasional**

Organisasi internasional mengacu pada pembentukan entitas formal yang dilakukan lebih dari satu negara secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Kemunculan organisasi internasional dilihat sebagai salah satu efek saling ketergantungan antar negara pada era globalisasi yang mengharuskan negara-negara yang ada saling bekerja sama. Pavehouse et al. dalam Rittberger et al. (2019) menjelaskan karakteristik sebuah organisasi internasional yaitu harus memiliki lebih dari tiga negara anggota, mengadakan pertemuan rutin, memiliki alamat korespondensi dan sekretariat permanen. Di sisi lain, Rudy (2005) juga memberikan definisi organisasi internasional, yaitu sebagai kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah negara lainnya ataupun dengan kelompok non-negara dari negara lainnya dengan struktur dan fungsi yang jelas guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Dewasa ini organisasi internasional telah menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama, baik itu di bidang ekonomi, politik, pertahanan, sosial, dan sebagainya. Penggunaan organisasi sebagai wadah dikarenakan dapat mempermudah negara untuk mendapatkan kepentingannya dibandingkan dengan memperjuangkannya secara sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Rudy (2005) peranan organisasi internasional sendiri adalah sebagai forum menjalin kerja sama dan meredakan ketegangan antara aktor, sarana perundingan, serta lembaga mandiri untuk mengeksekusi program yang telah direncanakan.

- **Konsep Kerjasama Internasional**

Zartman dan Touval (2010) melihat konsep kerjasama sebagai sebuah situasi dimana para aktor setuju untuk bekerja bersama-sama sehingga dapat diperoleh keuntungan yang tidak dapat diperoleh jika dilakukan secara mandiri. Doran dan Hampson melihat kerjasama sebagai sebuah strategi untuk memecahkan suatu isu (Zartman dan Touval, 2010). Sementara Keohane (2006)

mengatakan bahwa kerjasama terjadi ketika para aktor menyesuaikan perilakunya melalui proses koordinasi kebijakan. Hal ini mempertimbangkan dua aspek utama yaitu perilaku para aktor tadi diarahkan mencapai tujuan bersama dan melalui kerjasama para aktor memperoleh imbalan yang menguntungkan.

Kerjasama internasional dapat terjalin jika masing-masing negara memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, Ruloff (1985) menekankan tentang pentingnya tindakan resiprokal dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam sistem dimana negara-negara di dunia semakin bergantung dan saling memengaruhi satu dengan lainnya, kedua hal tersebut menjadi elemen penting bagi keberhasilan negara mencapai tujuannya. Dalam hal ini, dipandang bahwa negara hampir tidak mungkin lagi memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari negara lainnya.

- ***Belligerent***

Belligerent atau kelompok pemberontak muncul karena adanya rasa tidak puas terhadap pemerintah yang sah, sehingga kelompok ini cenderung menolak otoritas yang ada. Dalam Konvensi Jenewa 1949 (Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977), diatur mengenai kelompok pemberontak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional. Namun, tidak semua pemberontak akan secara otomatis diakui sebagai *belligerent* dalam hukum internasional. Untuk diakui sebagai *belligerent*, ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memiliki komando, memiliki identitas seperti lambang atau seragam, memiliki kendali atas wilayah tertentu, dan mendapatkan dukungan dari penduduk setempat (Girsang dan Simatupang, 2024). Dengan memenuhi syarat-syarat ini, kelompok pemberontak dapat mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent* dan mendapatkan hak serta kewajiban yang terkait dengan status tersebut dalam konteks hukum internasional. Oleh karena itu, penanganan terhadap kelompok ini menjadi penting dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, baik melalui upaya diplomasi atau intervensi militer jika diperlukan, dengan tujuan untuk mengatasi ancaman yang mereka timbulkan terhadap stabilitas keamanan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks melalui analisis mendalam dan deskriptif, yang penting untuk memahami sifat multifaset dari keamanan global dan kerangka organisasi yang diusulkan (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka yang komprehensif, dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal akademik, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti pendekatan analisis interaktif, yang mencakup beberapa tahapan: pengumpulan data, reduksi data, analisis, dan verifikasi. Pada tahap awal, data dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel untuk memastikan perspektif yang luas dan informatif mengenai topik ini. Selanjutnya, reduksi data dilakukan dengan merangkum dan

memfokuskan pada informasi yang paling relevan. Tahap analisis melibatkan interpretasi data untuk mengidentifikasi tema-tema dan wawasan kunci. Terakhir, verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan dengan melakukan pengecekan silang informasi dan memvalidasi interpretasi terhadap tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesadaran Global Akan Kebutuhan Keamanan

Kesadaran di kalangan pemimpin global semakin meningkat mengenai kebutuhan akan keamanan, sehingga kerjasama internasional tidak lagi hanya berfokus pada aspek ekonomi semata. Saat ini, terdapat upaya bersama untuk menghadapi perbedaan dan merancang solusi kolektif yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, guna menciptakan lanskap global yang lebih aman. Meskipun kemakmuran ekonomi tetap menjadi tujuan penting bagi setiap negara untuk menopang pembangunan nasional, keamanan kini menjadi prioritas utama yang tidak bisa diabaikan.

Sementara itu, pengaruh kekuatan besar tidak hanya dimiliki oleh AS dan Rusia, tetapi juga oleh China, yang telah muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang signifikan di panggung global (Hamzah & Daud, 2016). Meskipun demikian, posisi Amerika sebagai superpower dunia tetap kokoh, seperti yang dibuktikan oleh kekuatan militer dan ekonomi yang signifikan. Kehadiran militer global AS yang luas, yang ditunjukkan oleh banyaknya pangkalan militer di seluruh dunia, mencerminkan situasi yang genting yang memerlukan perhatian global. Setiap eskalasi yang tidak terkendali dapat berdampak pada negara lain, sehingga memerlukan kesiapsiagaan dari semua negara untuk mengelola keadaan tak terduga secara efektif (Hendrajit, 2017). Dalam konteks ini, konsep tradisional mengejar dominasi melalui kekuatan militer harus dipertimbangkan kembali. Di era modern yang ditandai oleh nilai-nilai kemanusiaan, negara-negara harus fokus pada hubungan kooperatif yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk saling menguntungkan, sehingga memastikan keamanan dan stabilitas global.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tantangan keamanan global sangat dipengaruhi oleh keterbatasan mekanisme internasional saat ini, termasuk PBB. Meskipun penting dalam diplomasi internasional, PBB sering kali kesulitan dalam mengelola atau mencegah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia secara efektif (Harper, 2024). Ketidakefektifan ini telah terlihat dalam kasus-kasus besar seperti kekerasan yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan konflik yang melibatkan kelompok bersenjata di wilayah seperti Papua, Afghanistan, dan Yaman. Masalah-masalah yang terus-menerus ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka keamanan global yang lebih kuat untuk menghadapi dan mengurangi tantangan tersebut secara lebih efektif.

Keterbatasan Mekanisme Internasional Saat Ini

PBB, sebagai lembaga utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sering menghadapi tantangan dalam menjalankan mandatnya secara efektif dikarenakan keterbatasan sumber daya, personel, dana, maupun logistik (Siregar et al., 2024). Sebagai contoh, konflik berkepanjangan di Timur

Tengah menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh PBB. Kekerasan antara berbagai kelompok dan negara di wilayah ini terus berlanjut meskipun ada upaya mediasi dan intervensi oleh PBB. Di Palestina, konflik yang sudah berlangsung lama antara Israel dan Hamas tetap belum terselesaikan, dengan banyak resolusi dan inisiatif internasional yang gagal mencapai solusi yang bertahan lama. Pergulatan yang terus berlangsung ini menyoroti keterbatasan efektivitas PBB dalam menangani konflik yang mendalam dan kompleks.

Meskipun PBB dan berbagai badan internasional telah berusaha untuk menangani situasi tersebut melalui misi dan program bantuan, ketidakmampuan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil menyoroti tantangan mekanisme internasional dalam mengelola konflik yang melibatkan aktor non-negara dan kelompok bersenjata. Upaya PBB dan komunitas internasional untuk menangani krisis ini seringkali terhambat oleh kesulitan dalam mengoordinasikan tindakan efektif dan mencapai solusi yang dapat mengakhiri kekerasan.

Perang antara Israel dan Hamas, serangan berkelanjutan terhadap personel militer Indonesia di Papua, dan penguasaan Taliban atas Afghanistan adalah contoh menonjol bagaimana kelompok pemberontak dapat merusak stabilitas negara. Jika masalah-masalah ini tetap tidak terselesaikan, pencapaian perdamaian global dan kemanusiaan akan semakin sulit. Situasi ini menuntut perhatian global, karena peradaban manusia bergantung pada berfungsinya negara-bangsa secara efektif. Tanpa mengatasi tantangan-tantangan ini, peran negara-bangsa sebagai pelindung warganya menjadi paradoksal, karena mereka juga menghadapi ancaman dari kekuatan internal dan eksternal.

Kebutuhan Akan Organisasi Militer Global

Untuk menciptakan lingkungan global yang damai, harmonis, dan makmur dengan tujuan mencegah dan mengantisipasi konflik antarnegara yang berpotensi memicu perang antarnegara, pembentukan sebuah organisasi militer global menjadi sangat penting. Organisasi ini akan berfungsi sebagai kekuatan kolektif yang dihormati dan tangguh. Kekuatan militer yang bersatu ini dapat berfungsi sebagai penangkal dan penghalang terhadap kelompok-kelompok pemberontak yang kehadirannya memperumit kehidupan bangsa-bangsa. Dalam perspektif hukum nasional, pemberontak dipandang sebagai entitas (baik kelompok maupun individu) yang melakukan perlawanan melalui tindakan kriminal (Rahim dan Timur, 2021).

Organisasi militer global yang dibentuk sebagai kekuatan internasional ini akan melibatkan personel militer dari setiap negara di dunia, sehingga menciptakan komitmen yang kuat untuk melawan serangan-serangan dari kelompok-kelompok pemberontak yang merongrong negara. Jika setiap negara terus-menerus dilemahkan oleh kelompok-kelompok pemberontak yang mengarah pada penggulingan kekuasaan secara kekerasan, maka peradaban manusia akan tetap berada di bawah ancaman yang membahayakan keselamatan global.

Organisasi militer global ini akan berbeda dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Pasukan penjaga perdamaian PBB bertugas menjaga

perdamaian global melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB, yang diatur untuk tidak digunakan demi kepentingan pihak mana pun yang terlibat dalam perselisihan. Oleh karena itu, pasukan penjaga perdamaian bersenjata hanya dikerahkan dalam situasi pertahanan diri atau non-agresi (Samekto, 1991). Sebaliknya, organisasi militer global ini akan lebih fokus pada upaya pencegahan dengan menciptakan efek penangkalan, di mana kelompok bersenjata atau pemberontak akan berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan atau melemahkan suatu negara, baik secara domestik maupun terhadap negara lain. Personel militer di setiap negara utamanya berfungsi untuk membela kedaulatan, integritas, dan keselamatan negara mereka dari ancaman domestik. Namun, para tentara ini bisa diberdayakan untuk berkolaborasi dan menjadi benteng kuat dalam menjaga stabilitas dan keamanan global melalui kerja sama lintas batas.

Dalam konteks keamanan global, kerjasama internasional dalam sebuah kerangka atau organisasi menjadi semakin penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Beragam dinamika ancaman tidak hanya mengganggu keamanan nasional, tetapi juga merusak kedamaian dunia. Dalam hal ini, asumsi bahwa negara-negara di abad ke-21 akan selalu berada dalam keadaan damai, sebagaimana yang diharapkan, tidak selalu dapat diwujudkan.

Ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari kelompok pemberontak atau teroris, tetapi juga dari konflik bersenjata antarnegara, perang saudara, serta ancaman non-militer seperti perubahan iklim, bencana alam, dan penyebaran penyakit menular. Organisasi semacam ini dapat menjadi platform untuk kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman terhadap keamanan seluruh umat manusia dan membangun kepercayaan bersama di antara negara-negara.

Dengan memperkuat kerja sama antarnegara dan meningkatkan peran organisasi internasional, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan stabil bagi seluruh umat manusia. Pembentukan organisasi militer global memerlukan kerja sama yang erat di antara negara-negara di seluruh dunia. Mekanisme yang memfasilitasi pembentukan organisasi semacam ini bisa melibatkan proses diplomasi multilateral, negosiasi intensif, dan kesepakatan kolektif yang mengikat. Selain itu, kerangka kerja dari organisasi militer global perlu dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kepentingan yang seimbang dan peran yang jelas dalam menjaga keamanan global. Dengan adanya organisasi militer global yang efektif, diharapkan sistem keamanan global yang lebih efisien dan responsif dapat dibentuk untuk mengatasi tantangan yang muncul di era kontemporer ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Studi ini menekankan pentingnya pembentukan organisasi militer global untuk menghadapi tantangan keamanan kontemporer dan memastikan stabilitas global. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang ada, khususnya PBB, menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengelola atau mencegah konflik dan ancaman pemberontakan secara efektif. Meskipun upaya terus dilakukan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah menyoroti

ketidakmampuan kerangka kerja saat ini dalam memberikan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.

Organisasi militer global yang diusulkan dianggap penting untuk menciptakan kekuatan kolektif yang tangguh, mampu mencegah dan menetralkan kelompok pemberontak yang semakin merongrong stabilitas negara dan keamanan global. Organisasi ini berbeda dari pasukan penjaga perdamaian PBB dengan lebih menekankan pada pencegahan proaktif daripada langkah-langkah reaktif. Dengan memanfaatkan kerja sama internasional dan aksi kolektif, organisasi ini bertujuan untuk membangun lingkungan global yang stabil, aman, dan sejahtera.

Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi utama muncul untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas global. Pertama, para pemimpin dunia harus memprioritaskan keamanan global di atas kepentingan nasionalistik. Ini berarti bahwa keputusan kebijakan harus didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan keamanan kolektif daripada ambisi individu atau nasional. Mengingat bahwa warga sipil sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh konflik, fokus utama pembuatan kebijakan harus pada melindungi kesejahteraan mereka dan memastikan bahwa keputusan dibuat demi kebaikan seluruh umat manusia.

Kedua, sangat penting bagi para pemimpin global untuk meninggalkan praktik hegemoni yang melemahkan negara lain. Alih-alih mengejar strategi yang menegaskan dominasi dan kontrol, para pemimpin harus mendorong semangat kekuatan kolektif dan kerja sama. Pergeseran pendekatan ini akan memfasilitasi lingkungan internasional yang lebih harmonis, di mana negara-negara bekerja sama untuk menghadapi ancaman bersama daripada saling bersaing.

Ketiga, pembentukan organisasi militer global sangat krusial. Organisasi ini harus dirancang untuk fokus pada penanggulangan ancaman pemberontak dan kelompok-kelompok pemberontak, bukan untuk melawan negara-negara berdaulat lainnya. Dengan menyatukan upaya melawan ancaman bersama, negara-negara dapat menciptakan respons yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap kegiatan pemberontakan yang mengganggu stabilitas kawasan dan mengancam perdamaian dunia. Selain itu, dalam organisasi militer global ini, peran kepemimpinan harus didistribusikan secara adil untuk mencegah dominasi satu negara. Misalnya, pergantian kepemimpinan antara kekuatan militer utama seperti Amerika Serikat dan Rusia dapat memastikan representasi yang seimbang dan adil dalam organisasi ini. Pendekatan ini akan membantu menghindari pengaruh yang berlebihan dari satu negara atas operasi dan keputusan strategis organisasi.

Keempat, penguatan upaya diplomatik. Para pemimpin dunia harus meningkatkan kerjasama multilateral untuk mendukung pembentukan dan berfungsinya organisasi militer global dengan efektif. Ini tidak hanya mencakup berbagi intelijen, tetapi juga mengembangkan strategi terkoordinasi untuk menangani kelompok pemberontak lintas batas. Pendekatan yang terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua negara peserta memiliki keselarasan dalam upaya mereka melawan ancaman pemberontak.

Kelima, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan organisasi militer global ini. Melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, Indonesia harus mempromosikan konsep organisasi militer global untuk memastikan lingkungan global yang stabil dan aman. Dengan mengambil peran aktif dalam inisiatif ini, Indonesia dapat berkontribusi pada upaya global yang bertujuan mencapai perdamaian dan keamanan jangka panjang.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan utama dari studi ini termasuk ruang lingkup dan penerapan organisasi militer global yang diusulkan. Selain itu, ketergantungan pada data kualitatif dari tinjauan literatur mungkin membatasi kemampuan studi ini dalam menangkap dinamika geopolitik secara real-time dan perspektif dari semua pemangku kepentingan yang relevan. Faktor-faktor ini menekankan perlunya penelitian empiris lebih lanjut untuk menyempurnakan dan mengoperasionalkan solusi yang diusulkan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, Barry. (2008). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. UK: ECPR Press Classics.
- Girsang, Meisya Tantri, dan Helga Yohana Simatupang. (2024). "Tinjauan Aspek Hukum Internasional Terhadap Tindakan Kelompok Pemberontakan Dalam Konteks Negara (Studi Kasus: Kelompok Kriminal Bersenjata Papua)." *Journal of Global Perspective*, Vol. 2(1), pp. 29-41.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamzah, Intan Suria dan Sity Daud. (2016). "Potensi Ancaman Kebangkitan Kuasa Ekonomi dan Ketentaraan China dalam Rantau Asia Pasifik". *Jurnal Sains Insani*, Vol. 1, pp. 61-68.
- Harper, Erica. (2024). "The UN Approach to Global Conflict is Flawed. Can the Human Rights Council Do More to Strengthen It?" *IPI Global Observatory*. Diakses pada 1 April 2024, dari <https://theglobalobservatory.org/2024/03/the-un-approach-to-global-conflict-is-flawed-can-the-human-rights-council-do-more-to-strengthen-it/>.
- Hendrajit, Hendrajit. (2017). "Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 5(1), pp. 31-41.
- Jervis, R. (2002). "Theories of War in an Era of Leading Power Peace". *American Political Science Review*, Vol. 96(1), pp. 1-14.
- Keohane, Robert O. (2006). *Cooperation and International Regimes*. In Richard Little dan Michael Smith (Editors), *Perspectives on World Politics*. London: Routledge.

- Kirchner, Emil J. (2007). Regional and Global Security: Changing Threats and Institutional Responses. In Emil J. Kirchner dan James Sperling (Editors), *Global Security Governance: Competing Perceptions of Security in the 21st Century*. New York: Routledge.
- Rahim, A. S., & Timur, F. G. C. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, Vol. 2(1), pp. 11-30.
- Rittberger, Volker et al. (2019). *International Organization*. United Kingdom: Bloomsbury Academic.
- Rudy, Teuku May. (2005). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ruloff, Dieter. (1985). Cooperation, Integration, and National Characteristics: A Comparative Empirical Analysis Using New Indicators. In Michael Don Ward (Editor), *Theories, Models, and Simulations in International Relations*. London: Westview Press.
- Samekto, Adji. (1991). "Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sebagai Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 21(1), pp. 25-35.
- Samekto, Adji. (2018). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Asep. (2017). "Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan Atas Analisa Barry Buzan". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 3(1), pp. 33-61.
- Siregar, E. S., Siregar, F. I., Rizky, M., Al Fatur, R., Natasya, S., & Warohma, N. (2024). Antara Idealisme dan Realitas: Analisis Kritis Peran Ganda PBB dalam Menegakkan dan Melemahkan Hukum Internasional di Tengah Kompleksitas Global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4(4), pp. 3929-3944.
- Stoett, Peter. (1999). *Human and Global Security: An Exploration of Terms*. Canada: University of Toronto Press Incorporated.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zartman, William I. dan Saadia Touval. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. UK: Cambridge University Press.